

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA
(Studipada Motif Batik di KabupatenBlora)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Disusun Oleh:

NUZULLIA DIAN PERTIWI

C.100.130.101

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Artikel publikasi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

PUBLIKASI ILMIAH

NUZULLIA DIAN PERTIWI

C.100.130.101

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Inayah'.

(Inayah, SH. MH.)

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Yang ditulis oleh :

NUZULLIA DIAN PERTIWI

C.100.130.101

Telah dipertahankan didepan dewan penguji
Fakultas hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Inayah, SH., MH
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, SH., MH
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, SH., MH
(Anggota II Dewan Penguji)

()

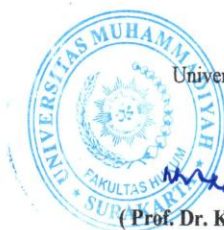
()

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Prof. Dr. Khuzaifah Dimiyati SH., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Oktober 2017

Penulis



NUZULLIA DIAN PERTIWI
C 100 130 101

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA (Studi pada Motif Batik di Kabupaten Blora)

ABSTRAK

Hak Cipta adalah hak istimewa yang dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya tertentu dalam membatasi dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Pencipta memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu ciptaannya. Suatu ciptaan tetap mendapat perlindungan hukum jika ciptaan tersebut tidak didaftarkan. Untuk memperoleh kekuatan hukum apabila terjadi pelanggaran maka ciptaan tersebut perlu didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencipta motif batik Blora paham dalam melindungi hasil ciptaannya. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa pengrajin batik Blora yang sudah mendaftarkan hasil ciptaannya dan beberapa pengrajin batik lainnya memberikan teguran serta memutuskan hubungan kerja dengan pengrajin lain yang tanpa izin meniru motif batiknya. Dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum meskipun tanpa didaftarkan tetap mendapatkan perlindungan hukum. Adanya pendaftaran hak cipta ini, sangatlah membantu para pencipta motif batik Blora dalam memperoleh kekuatan hukum atas ciptaannya meskipun para pencipta motif batik Blora seakan tidak peduli terhadap aturan yang ada namun hal seperti ini perlu mendapatkan perhatian lebih.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta

ABSTRACT

Copyright is the prerogative of the creator or copyright holder to regulate the use of certain works in limiting and preventing unauthorized use of a work. The Creator has rights and obligations to a creation. A creation shall still have legal protection by law if the work is not registered. To obtain legal force of law in case of violation, the creator needs to be registered to the Directorate General of Intellectual Property Rights (IPR).

The results showed indicate that the creator of batik motifs Blora understand in protecting his creation. This is indicated by some batik artisans of Blora who have registered the results of his creation and some other batik craftsmen only to rebuke and terminate the working relationship with other artisans who unlicensed imitate his batik motif. In this case aims to get legal protection even without being registered still get legal protection. The existence of this copyright registration, is very helpful for the creators of batik motifs Blora in obtaining the legal power of his creation although the creators of batik motifs Blora as if no matter to the existing rules but things like this need to get more attention.

Key words: Protection Law, Copyright

1. PENDAHULUAN

Batik merupakan seni rentang warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan), hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi.¹ Perkembangan batik sekarang ini sangatlah pesat, hal ini dikarenakan batik mengalami inovasi dan kreatifitas yang muncul dari pengrajin batik. Banyak motif batik yang memiliki nilai seni dan nilai filosofi cukup tinggi yang mewakili berbagai daerah di Indonesia.

Motif batik Kabupaten Blora memiliki ciri khas yang berbeda dengan motif daerah lainnya. Motif batik ini merupakan simbol potensi Kabupaten Blora yang sangat kental dengan budaya lokal masyarakat Kabupaten Blora. Tidak banyak yang tahu memang tentang motif batik Blora ini, tetapi sekarang ini sudah banyak yang mengenal bahkan memakainya. Bentuknya yang sangat unik, yaitu desain batik yang mencerminkan kehidupan Kabupaten Blora, seperti motif tanaman jati yang diilhami dari melimpahnya tanaman kokoh jati dimana 40% wilayah Kabupaten Blora adalah hutan jati, motif barongan yang merupakan salah satu kesenian rakyat yang amat populer di kalangan masyarakat Blora, motif ungker yang diilhami dari ulat pada daun jati yang selalu ada setiap musim hujan, dan motif tayub yang merupakan salah satu kesenian yang ada di Blora.

Citra motif batik Kabupaten Blora yang bagus seharusnya diiringi oleh kesuksesan para pengrajinnya. Kiprah mereka di dunia industri batik memang sudah bagus dan dinilai sukses, tapi sampai saat ini masih terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan, adanya konflik kecil yang terjadi pada pengrajin batik. Pengrajin yang memiliki kreativitas tinggi dapat menghasilkan motif-motif baru, dengan sedikit modifikasi agar tercipta motif baru tapi tidak merubah citra motif batik Kabupaten Blora. Pengrajin motif batik yang tidak melakukan pembuatan motif dalam satu tempat, membuat pengrajin motif batik lain mudah untuk mengetahui jika ada motif bagus, sehingga memicu mereka untuk mencontohnya, dan tentu saja hal ini sangat tidak diinginkan oleh pemilik motif tersebut.

¹ Afrillyana Purba, 2005, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal 44.

Sehingga pengrajin tersebut harus berusaha untuk melindungi motif-motif batik ini.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah merinci 19 kelompok ciptaan sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan. Ciptaan-ciptaan yang dikelompokkan merupakan ciptaan yang tergolong tradisional dan yang tergolong baru. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Dalam hal ini, karya seni batik atau seni motif lain diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan semua hasil ciptaan manusia dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, maka hak milik tersebut sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikir.²

Pendaftaran suatu ciptaan bukanlah untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hasil ciptaan tersebut, melainkan seorang pencipta yang tidak mendaftarkan hak ciptanya juga mendapatkan perlindungan, asalkan ia benar-benar sebagai pencipta suatu ciptaan tertentu. Perlindungan hukum yang diberikan ini berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban atas kekayaan intelektual. Dengan adanya perlindungan hukum ini pencipta dapat merasa aman untuk melindungi hasil ciptaannya tersebut.

1.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap motif batik Kabupaten Blora berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta? 2. Usaha apa

²Rindia Fanny Kusumaningtyas, "Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa" dalam Jurnal Online (Januari, 2014), hal.95, <http://www.e-jurnal.com/2014/01/perlindungan-hak-cipta-atas-motif-batik.html> , (Diakses pada tanggal 10 Maret 2017, pukul 06.39 WIB).

sajakah yang dilakukan oleh pengusaha batik Blora untuk melindungi motif batik Kabupaten Blora?

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan maka penelitian ini bertujuan: 1. Tujuan Obyektif: a) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap motif batik Kabupaten Blora. b) Untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh pengusaha batik Kabupaten Blora dalam melindungi motif batik Kabupaten Blora. 2. Tujuan Subyektif: a) Untuk memperoleh data dan informasi secara jelas dan lengkap sebagai bahan penyusunan skripsi sebagai prasyarat guna menyelesaikan studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. b) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dibidang Hukum Perdata terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan pelaksanaan perlindungan hukum pada motif batik di Kabupaten Blora serta memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis-empiris dimana penelitian ini didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita, dan permasalahan di lapangan. 2. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala tau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. 3. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Data Primer yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan berupa fakta dan keterangan hasil wawancara dengan pengrajin batik Blora. b. Data Sekunder ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan

yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan hanya berfungsi sebagai penjelasan dari bahan hukum primer.

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Patricia Loghlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).³

Mengacu pada pengertian hak cipta berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUHC, maka terdapat unsur penting sebagai hak-hak yang dimiliki si pencipta, yaitu: a. hak ekonomi, b. hak moral.⁴

UUHC No 28 Tahun 2014 telah merinci 19 kelompok ciptaan sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1). Ciptaan-Ciptaan yang dikelompokkan merupakan ciptaan-ciptaan yang tergolong tradisional dan yang tergolong baru. Pada dasarnya yang dilindungi adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlu ada keahlian dari pencipta untuk dapat menciptakan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Selain pasal 40 ayat (1) ada pula

³ Afrillyanna Purba, *Op. Cit*, hal. 19.

⁴ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 89.

ciptaan yang dilindungi UUHC, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 38 ayat (1) dan pasal 39 ayat (1).

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapat hak cipta. Meskipun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.⁵

Pendaftaran hak cipta akan memberikan manfaat bagi si pendaftar. Manfaatnya adalah pendaftar tersebut dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Pendaftar menikmati perlindungan hukum sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak lain (bukan pendaftar) yang menjadi pencipta. Jangka waktu perlindungan hak cipta diatur dalam pasal 57 sampai dengan pasal 61 Undang-Undang no 28 Tahun 2014.

2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Batik

Secara etimologi, kata batik berasal dari bahasa Jawa “amba” yang berarti lebar, luas, kain; dan “titik” yang berarti titik atau matik (kata kerja membuat titik) yang kemudian berkembang menjadi istilah “batik”, yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar.⁶

Pada awalnya, batik digunakan sebagai hiasan pada daun lontar yang berisi naskah atau tulisan agar tampak lebih menarik. Seiring perkembangan interaksi bangsa Indonesia dengan bangsa asing, maka mulai dikenal media batik pada kain. Sejak itu, batik mulai digunakan sebagai corak kain yang berkembang sebagai busana tradisional, dan khusus digunakan di kalangan ningrat keraton. Di masa lalu, batik bukan hanya digunakan untuk melatih ketrampilan lukis (menggambar) dan sungging (mewarnai dengan cat), namun merupakan seni yang sarat dengan pendidikan etika dan estetika bagi perempuan.⁷

⁵ Syarifuddin, 2013, *PERJANJIAN LISENSI DAN PENDAFTARAN HAK CIPTA*, Bandung: P.T. ALUMNI, hal. 164.

⁶ Ari Wulandari, 2011, *Batik Nusantara*, Yogyakarta: ANDI, hal. 4.

⁷ *Ibid*, hal. 20.

Dalam perkembangan bentuk dan fungsinya, batik memiliki ragam corak dan warna desain yang dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak busana batik dan blus batik hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Batik tradisional tetap mempertahankan coraknya, dan masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

Batik secara historis berasal dari zaman nenek moyang yang pada mulanya ditulis dan dilukis pada daun lontar. Saat itu motif atau pola batik masih didominasi dengan bentuk binatang dan tanaman. Corak batik sangat dipengaruhi oleh letak geografis daerah pembuatan, sifat dan tata kehidupan daerah bersangkutan, kepercayaan, dan adat istiadat yang ada, keadaan alam sekitar, termasuk flora dan fauna, serta adanya kontak atau hubungan antardaerah pembuatan pembatikan.⁸

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Kabupaten Blora Berdasarkan Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Seni batik pada hakikatnya menjadi suatu penyalur kreasi rasa yang mengandung makna tersendiri yang dikaitkan dengan hal tradisi sampai dengan kehidupan sehari-hari. Besarnya makna yang tersirat melalui sehelai kain tersebut, batik mempunyai aspek yang menarik untuk diungkap dan dikembangkan sehingga batik akan mengalami serangkaian siklus yang terus berubah pada zamannya.

Batik mulai dikenal dan populer di kalangan masyarakat baik di dalam dan di luar negeri. Perkembangan batik juga diikuti di berbagai daerah di Nusantara. Blora adalah salah satu dari daerah di Indonesia yang mengembangkan batik. Perbatikan di Blora muncul didasari adanya semangat bersama untuk menciptakan batik khas sebagai identitas daerah Kabupaten Blora. Batik Blora termasuk dalam kategori batik modern, yang dimaksud dengan batik modern yaitu adalah semua jenis batik yang sifat dan gayanya tidak seperti batik

⁸*Ibid*, hal. 104.

tradisional. Pada batik tradisional susunan motifnya terikat oleh suatu ikatan (pakem) tertentu. Dalam hal ini batik Blora lebih menggambarkan kehidupan sehari-hari dan cenderung menggunakan motif yang bebas dan berbeda dengan kaidah batik tradisi yang dengan sadar menggunakan simbol dan memperhatikan makna dan filosofi dalam motifnya.

Batik Blora mempunyai motif yang unik dan berbeda dari batik lain. Motif batik Blora mengangkat kesenian, kebudayaan, makanan khas Blora sebagai suatu daya tarik dan identitas lokal Blora.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan⁹.

Menurut UU no 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta, menerangkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu konsep dasar pengakuan lahirnya Hak Cipta adalah sejak ide atau gagasan itu dituangkan dan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pengakuan lahirnya Hak Cipta tersebut tidak diperlukan formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri, indikasi geografis, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak¹⁰.

Syarat yang harus ada dalam perlindungan hukum di bidang Hak Cipta adalah asas originalitas (keaslian). Keaslian ini tidak bias dilakukan seperti halnya *novelty* (kebaruan) yang ada dalam paten, karena prinsip originalitas adalah tidak

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, hal. 70.

¹⁰ Tim Lindsey, 2002, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar*, Bandung: P.T. ALUMNI, hal. 124.

meniru ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian oleh penciptanya¹¹.

Berdasarkan uraian tentang pengertian batik, dapat dijelaskan bahwa batik Blora merupakan kain bergambar yang dibuat dengan menuliskan *malam* hingga membentuk suatu motif yang menggambarkan kehidupan masyarakat Blora yang kental dengan budaya lokalnya. Secara definitif, penciptaan motif batik Blora mengandung beberapa unsur yaitu pencipta, ciptaan, motif, unsur seni dan originalitas. Penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) tentang hak cipta, Pasal 1 ayat (2) tentang pencipta, dan Pasal 1 ayat (3) tentang ciptaan.

Selain itu, motif batik Blora yang dibuat oleh pengrajin batik, baik perorangan maupun bersama-sama merupakan salah satu bentuk ciptaan, dimana pengrajin batik tersebut dinyatakan sebagai pencipta sekaligus pemegang Hak Cipta dari hasil karya motif batik tersebut.

Motif batik Blora hasil kreasi dan inovasi dari pengrajin batik saat ini merupakan batik kontemporer yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Dengan demikian, seni batik termasuk di dalamnya batik Blora telah mendapat perlindungan hukum di dalam hukum positif di Indonesia.

Terkait dengan masa berlaku hak cipta, termuat dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dapat dijelaskan bahwa seni batik sebagai ciptaan yang dilindungi, maka pemegang hak cipta atas karya batik memperoleh perlindungan selama hidupnya dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Bagi hak cipta yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, hal ini termuat dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No 28 tahun

¹¹ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT.Alumni, hal 121.

2014 tentang Hak Cipta. Selama jangka waktu perlindungan tersebut, pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, atau memberi ijin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan untuk memperbanyak ciptaan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Usaha yang Dilakukan oleh Pengrajin Batik Blora untuk Melindungi Motif Batik Blora

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan terhadap beberapa pengrajin batik Kabupaten Blora, para pengrajin batik mengatakan usaha yang dilakukan untuk melindungi motif batik Blora tersebut dengan memberikan teguran dan memutuskan hubungan kerja dengan pengrajin batik lain yang sengaja tanpa izin meniru motif batik yang telah diciptakan oleh pengrajin batik tersebut. Alasan pengrajin batik yang hanya memberikan teguran kepada pengrajin batik lain karena mereka tidak mau membesar-besarkan masalah tersebut agar kedua belah pihak tidak merusak nama baiknya. Selain itu mereka juga tidak mau masyarakat Blora mengetahui masalah tersebut.¹²

Selain teguran dan pemutusan hubungan kerja yang diberikan oleh pengrajin batik Blora kepada pengrajin batik lain yang dengan sengaja meniru motif tersebut, beberapa pengrajin batik Blora juga telah mendaftarkan hasil dari motif ciptaannya tersebut ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, akan tetapi sampai sekarang sertifikat atas perlindungan hukum tersebut belum diterima oleh beberapa dari pengrajin batik Kabupaten Blora.

Sebagaimana termuat dalam pasal 66 sampai dengan pasal 73 Undang-Undang No 28 tahun 2014 yang hanya mengatur tentang tata cara pencatatan Hak Cipta di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Faktor yang menyebabkan para pengrajin batik belum bertindak untuk melindungi karyanya karena rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta, para pengrajin juga belum menganggap penting perlindungan hukum terhadap pendaftaran batik, biaya pendaftaran hak cipta yang relatif mahal dan prosedur pendaftaran yang berbelit-belit juga dikarenakan banyaknya syarat permohonan

¹²Wawancara dengan beberapa pengrajin batik Kabupaten Blora.

pendaftaran ciptaan yang harus dipenuhi. Selain adanya faktor tersebut, pengrajin batik Blora juga menganggap bahwa suatu peniruan motif batik merupakan suatu hal yang biasa.

Adanya kebiasaan umum yang berlaku di kalangan pengrajin batik untuk menjiplak motif di antara sesama pengusaha batik karena mereka menganggap bahwa motif tersebut sedang tren di pasaran. Aspek kebudayaan pun turut mendukung belum dimanfaatkannya Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana ciri khas sikap masyarakat Indonesia yang mementingkan sikap toleransi dan gotong royong di dalam kehidupan masyarakat, sehingga apabila suatu motif yang telah dibuat kemudian ditiru oleh pihak lain, maka pencipta motif tersebut justru akan merasa senang karena dapat membantu orang lain. Budaya ini sangat terkait dengan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni “masalah paradigma (cara pandang) masyarakat terhadap kejahatan hak cipta itu sendiri”.¹³

Minimnya kesadaran hukum para pengrajin batik untuk mendaftarkan motif batiknya karena tidak adanya keharusan melakukan pendaftaran. Menurut hukum hak cipta, suatu ciptaan yang diwujudkan dari suatu ide akan secara otomatis dilindungi pada saat ciptaan itu diumumkan pertama kali oleh penciptanya. Pentingnya perlindungan batik ini terkait hak ekonomi dan hak moral dari pencipta yang bersangkutan. Ciptaan yang tidak didaftarkan hanya memiliki perlindungan bagi pencipta yang bersangkutan, sehingga apabila karya ciptanya ditiru oleh pihak lain akan sulit untuk membuktikan kepemilikannya. Sebagai upaya perlindungan terhadap batik tersebut, peran aktif dari pemerintah juga diharapkan dalam memfasilitasi pendaftaran hak cipta batik ini. Bagaimanapun ada kendala seperti itu, dalam hal ini ketentuan pendaftaran juga sangatlah penting karena berkaitan dengan Hak Cipta motif batik di kalangan pengrajin batik.

¹³ Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: Alumni, hal. 257.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Kabupaten Blora Berdasarkan Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014, hak cipta motif batik Kabupaten Blora telah layak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur dalam hak cipta yaitu, pencipta, ciptaan, motif, unsur seni dan originalitas atau keaslian dari pencipta motif batik tersebut. Penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) tentang hak cipta, Pasal 1 ayat (2) tentang pencipta, dan Pasal 1 ayat (3) tentang ciptaan. Dalam hal ini, perlindungan hukum hak cipta motif batik Kabupaten Blora tidak melindungi suatu ide atau gagasan, akan tetapi hak cipta melindungi perwujudan dari suatu gagasan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari penciptanya. Meskipun para pengrajin batik Blora belum mendaftarkan hak cipta atas motif ciptaannya tersebut, mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum, karena perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 64 ayat (2) dalam Undang-Undang No 28 tahun 2014.

Motif batik Kabupaten Blora termasuk dalam batik kontemporer. Batik kontemporer adalah seni batik hasil kreasi dan inovasi dari pengrajin batik yang dibuat secara konvensional sesuai dengan keinginan dari para pengrajin batik yang bertujuan untuk komersil atau industri. Batik Blora ini mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna yang mencerminkan kehidupan masyarakat dan kesenian yang ada di Kabupaten Blora. Dengan ini motif batik Kabupaten Blora layak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena telah memenuhi unsur yang termuat dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf j tentang ciptaan yang dilindungi,.

4.1.2 Usaha yang Dilakukan oleh Pengrajin Batik Blora untuk Melindungi Motif Batik Blora

Usaha yang dilakukan oleh pengrajin batik Blora untuk melindungi motif batik Blora tersebut dengan memberikan teguran dan memutuskan hubungan kerja dengan pengrajin batik lain yang sengaja tanpa izin meniru motif batik yang telah diciptakan oleh pengrajin batik tersebut. Alasan pengrajin batik yang hanya memberikan teguran kepada pengrajin batik lain karena mereka tidak mau membesar-besarkan masalah tersebut agar kedua belah pihak tidak merusak nama baiknya. Selain itu mereka juga tidak mau masyarakat Blora mengetahui masalah tersebut.

Selain teguran dan pemutusan hubungan kerja yang diberikan oleh pengrajin batik Blora kepada pengrajin batik lain yang dengan sengaja meniru motif tersebut, 5 dari 37 pengrajin batik Blora juga telah mendaftarkan hasil dari motif ciptaannya tersebut ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, akan tetapi sampai sekarang sertifikat atas perlindungan hukum tersebut belum diterima oleh beberapa dari pengrajin batik Kabupaten Blora.

4.2 Saran

- a. Bagi Pemerintah perlunya sosialisasi kepada pengrajin batik Kabupaten Blora untuk memahami Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Perlunya peran dari Pemerintah Daerah untuk memberikan sosialisasi lebih mengenai perlindungan hukum atas motif batik serta lebih memfasilitasi karya ciptaan pengrajin batik di Kabupaten Blora, agar pengrajin batik berlomba-lomba untuk menciptakan motif batik yang baru sehingga bermanfaat untuk Kabupaten Blora, seperti; pemerintah Kabupaten Blora membuat sebuah kompetisi untuk memperingati hari jadi kabupaten Blora dengan menciptakan motif batik baru dan motif yang terpilih diberikan penghargaan dengan motif tersebut menjadi *icon* atau simbol baru untuk Kabupaten Blora tanpa merubah filosofi yang mencerminkan kehidupan masyarakat Kabupaten Blora.

- c. Perlunya kesadaran bagi para pengrajin batik untuk melindungi ciptaan baru hasil kreativitasnya sendiri, sehingga motif batik yang ada di Indonesia ini bertambah dan juga diharapkan adanya rasa saling menghargai antara pengrajin batik terhadap karyanya dan pengrajin batik lain perlu untuk meminta dan mendapat izin dari pencipta motif batik jika ingin meniru motif batik milik pengrajin batik lain. Selain itu, para pengrajin batik harus memahami hukum hak cipta untuk lebih melindungi hasil dari ciptaannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Otto, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: Alumni
- Lindsey, Tim, 2002, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar*, Bandung: P.T. ALUMNI
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Purba, Afrillyana 2005, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Perbedaan Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif*<http://ayumilyuner.blogspot.co.id/2013/11/perbedaan-perlindungan-hukum-preventif.html>, diakses pada 11 Agustus 2017 jam 15.16
- Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa” dalam Jurnal Online (Januari, 2014), hal. 15, <http://www.e-jurnal.com/2014/01/perlindungan-hak-cipta-atas-motif-batik.html>, (Diakses pada tanggal 10 Maret 2017, pukul 06.39 WIB)
- Suryo, Tomi Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syarifuddin, 2013, *PERJANJIAN LISENSI DAN PENDAFTARAN HAK CIPTA*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT.Alumni.
- Wulandari, Ari, 2011, *Batik Nusantara*, Yogyakarta: ANDI